

ABSTRAK

Penyalagunaan data pribadi dalam ekosistem pinjaman online (pinjol) telah menjadi isu hukum yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya penetrasi layanan keuangan digital. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan hukum terkait perlindungan data pribadi pada kasus-kasus penyebaran, pemrosesan ilegal, dan penggunaan tanpa hak oleh penyelenggara maupun pihak ketiga dalam layanan pinjaman online. Kajian ini menyoroti disharmonisasi regulasi antara Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta aturan turunannya, yang menyebabkan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Temuan menunjukkan bahwa ketiadaan Lembaga Perlindungan Data Pribadi sebagai otoritas independen berdampak pada lemahnya mekanisme pengawasan, pelaporan insiden, dan pemberian sanksi administratif. Di sisi lain, tumpang tindih pengaturan pidana antara UU PDP dan UU ITE memicu ambiguitas dalam penentuan pasal yang digunakan oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi dan penguatan kelembagaan untuk memastikan perlindungan data pribadi yang lebih efektif dalam kasus pinjaman online.

Kata Kunci : Pinjaman Online, Kebijakan Hukum, Penyalahgunaan Data, Penegakan Hukum Disharmonisasi Regulasi.

ABSTRACT

The misuse of personal data in online lending (pinjol) ecosystems has increasingly become a complex legal issue as digital financial services continue to expand. This study examines the implementation of legal policies on personal data protection in cases involving unauthorized dissemination, illegal processing, and misuse of personal data by service providers and third parties within online lending platforms. The analysis highlights regulatory disharmony between the Personal Data Protection Law (UU PDP), the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), and their derivative regulations, which contributes to uncertainty in law enforcement. The findings indicate that the absence of an independent Personal Data Protection Authority weakens oversight mechanisms, incident reporting obligations, and the imposition of administrative sanctions. Additionally, the overlapping criminal provisions between UU PDP and UU ITE create ambiguity in determining applicable articles for prosecution. This study emphasizes the need for regulatory harmonization and institutional strengthening to ensure more effective personal data protection in online lending cases.

Keywords : Online Lending; Legal Policy, Data Misuse, Law Enforcement, Regulatory Disharmony.